KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 6 No. 4 November 2026, 6287-6294
ISSN: 2810-0573 (online), https://lptnunganjuk.com/ojs/index.php/kartika

Analisis Islamic Human Development Index di Sulawesi Selatan Tahun 2021–2025: Pendekatan Maqashid Syariah

Tiara Ragatika Cahyani Hamid, Ahmad Syarif Iskandar, Adzan Noor Bakri
Universitas Islam Negeri Palopo, Indonesia
Email: tiararagatika19@gmail.com

Abstract

Human development is commonly assessed through material and social indicators, while the Islamic perspective also considers the protection of essential human interests. This study analyzes human development in South Sulawesi Province using the Islamic Human Development Index (I-HDI) based on Maqashid Syariah. It applies a descriptive quantitative approach to secondary data for 24 regencies and cities over 2021–2025, drawing on indicators associated with the protection of religion, life, intellect, lineage, and wealth. The manuscript reports that the average I-HDI increased from 66.80 in 2021 to 77.89 in 2025. Makassar recorded the highest reported five-year average (91.15), while Jeneponto recorded the lowest (55.04). These results indicate an overall upward trend alongside substantial differences among local governments. However, the completeness of the underlying district-level dataset, the operational formulas, and the classification thresholds require author verification before the index values can be independently reproduced. The findings may provide an additional perspective for regional human-development assessment, provided that the indicator construction and data sources are fully documented.

Keywords: *Islamic Human Development Index; Maqashid Syariah; human development; South Sulawesi*

Abstrak

Pembangunan manusia lazim dinilai melalui indikator material dan sosial, sedangkan perspektif Islam juga mempertimbangkan perlindungan terhadap kebutuhan dasar manusia. Penelitian ini menganalisis pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan Islamic Human Development Index (I-HDI) berbasis Maqashid Syariah. Penelitian menerapkan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder pada 24 kabupaten/kota selama 2021–2025. Indikator yang digunakan berkaitan dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Naskah melaporkan bahwa rata-rata I-HDI meningkat dari 66,80 pada 2021 menjadi 77,89 pada 2025. Kota Makassar mencatat rata-rata lima tahunan tertinggi sebesar 91,15, sedangkan Kabupaten Jeneponto mencatat nilai terendah sebesar 55,04. Temuan tersebut menunjukkan kecenderungan peningkatan secara agregat, tetapi capaian antardaerah masih berbeda. Meskipun demikian, kelengkapan data kabupaten/kota, rumus operasional setiap dimensi, dan ambang klasifikasi masih memerlukan konfirmasi penulis agar hasil perhitungan dapat direplikasi. Hasil penelitian dapat menjadi perspektif tambahan dalam penilaian pembangunan manusia daerah apabila konstruksi indikator dan sumber datanya dijelaskan secara lengkap.

Kata Kunci: Islamic Human Development Index; Maqashid Syariah; pembangunan manusia; Sulawesi Selatan

Copyright: © 2026. The Author(s).
KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License

A. Pendahuluan

Pembangunan bidang ekonomi merupakan salah satu strategi untuk mencapai kehidupan masyarakat yang sejahtera. Bidang ekonomi menjadi perhatian penting karena berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Perencanaan pembangunan karena itu sering diarahkan pada penguatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, jumlah pengangguran, tingkat kemiskinan, dan neraca pembayaran merupakan sejumlah ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan tren peningkatan selama 2021–2025 berdasarkan angka yang dicantumkan dalam naskah. IPM tercatat sebesar 72,24 pada 2021, meningkat menjadi 72,82 pada 2022, 73,58 pada 2023, 74,18 pada 2024, dan 74,75 pada 2025. Rangkaian angka tersebut menggambarkan peningkatan capaian pembangunan manusia menurut indikator IPM.[12]

Namun, IPM mengukur pembangunan manusia melalui dimensi yang bersifat umum dan belum secara eksplisit mengintegrasikan lima tujuan pokok syariah. Dalam perspektif Islam, pembangunan manusia juga berkaitan dengan perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal).[3]

Islamic Human Development Index (I-HDI) diperkenalkan sebagai pendekatan untuk mengukur pembangunan manusia berdasarkan Maqashid Syariah. Anto mengembangkan gagasan pengukuran pembangunan manusia dalam perspektif Islam melalui lima dimensi tersebut.[1] Pendekatan ini memperluas pembacaan pembangunan manusia karena mempertimbangkan dimensi spiritual dan sosial selain kondisi material.[4]

Paradigma pembangunan yang hanya menekankan capaian fisik dan material berisiko mengabaikan dimensi mental dan spiritual. Dalam kerangka Maqashid Syariah, pembangunan diarahkan pada kemaslahatan yang mencakup perlindungan kebutuhan dasar manusia. Karena itu, pengukuran berbasis I-HDI dapat digunakan sebagai perspektif pelengkap bagi indikator pembangunan manusia yang telah tersedia.[5]

Penelitian terdahulu mengenai I-HDI telah membahas konstruksi indeks, pengukuran lintas wilayah, dan penerapannya pada konteks nasional maupun daerah. Akan tetapi, naskah

---

[1] Badan Pusat Statistik, "Indeks Pembangunan Manusia," tanpa tahun; Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, tanpa tahun. Detail URL dan tahun publikasi perlu dilengkapi berdasarkan sumber data yang benar-benar digunakan penulis.

[2] Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, publikasi dan data Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Selatan. Tahun, judul publikasi, tabel, dan URL spesifik perlu dilengkapi berdasarkan dokumen data yang digunakan.

[3] M. B. H. Anto, "*Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries*," Islamic Economic Studies 19, no. 2 (2011): 69–95.

ini belum menyajikan telaah komparatif yang cukup untuk menjelaskan perbedaan hasil, indikator, dan pendekatan penelitian terdahulu yang paling dekat dengan konteks Sulawesi Selatan. Kesenjangan ini perlu ditopang oleh uraian dan sitasi spesifik terhadap studi yang relevan.[6]

Research gap yang dapat diarahkan dari naskah ini terletak pada kebutuhan untuk menggambarkan perkembangan I-HDI secara komparatif pada 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dalam satu rentang waktu lima tahun. Namun, klaim bahwa kajian ini merupakan penelitian pertama atau memiliki kebaruan yang belum pernah dilakukan belum dapat ditegaskan sebelum penulis membandingkannya secara sistematis dengan penelitian terdahulu, termasuk studi I-HDI tingkat daerah.

Dengan demikian, kontribusi yang sementara dapat diidentifikasi adalah penyajian perbandingan perkembangan dan posisi relatif I-HDI antarkabupaten/kota di Sulawesi Selatan selama 2021–2025. Kontribusi ini bersifat deskriptif dan perlu dipertegas melalui penjelasan sumber data, formula operasional, serta pembandingan dengan temuan penelitian terdahulu. Penelitian ini bertujuan menganalisis nilai I-HDI, perkembangannya, dan peringkat kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode tersebut.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Objek penelitian mencakup 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang menurut uraian penulis diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Periode analisis yang digunakan dalam judul, tabel hasil, dan pembahasan adalah 2021–2025. Naskah sumber pada bagian metode menyebutkan periode 2021–2026; ketidaksesuaian ini memerlukan konfirmasi penulis.[7]

Indikator yang disebutkan dalam naskah meliputi angka kriminalitas, angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, angka kelahiran total, angka kematian bayi, dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Indikator tersebut dipetakan ke dalam lima dimensi *Maqashid Syariah*, yaitu ad-din, an-nafs, al-'aql, an-nasl, dan al-mal. Naskah menyebutkan penggunaan data kabupaten/kota, tetapi belum menguraikan secara rinci definisi operasional, satuan, tahun rujukan, serta penanganan data yang tidak tersedia.

---

[6] A. A. M. N. Khan and S. R. M. Shafiai, "*Measuring the Islamic Human Development Index (I-HDI) for OIC Countries," Islamic Economic Studies* 27, no. 1 (2019): 87–114. DOI belum tercantum secara terverifikasi dalam daftar pustaka sumber.

[7] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014).

Analisis dilakukan melalui normalisasi indikator dan agregasi ke dalam nilai I-HDI, kemudian dilanjutkan dengan penghitungan rata-rata tahunan dan pemeringkatan kabupaten/kota. Akan tetapi, persamaan matematis yang seharusnya menjelaskan normalisasi dan agregasi tidak tampil pada dokumen sumber. Oleh karena itu, formula dan prosedur pembobotan belum dapat direplikasi dan harus dilengkapi oleh penulis sebelum artikel dapat dinilai final.[8]

C. Pembahasan

1. Hasil Perhitungan I-HDI

Pengukuran I-HDI dilakukan terhadap kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2021–2025. Perhitungan didasarkan pada lima dimensi Maqashid Syariah, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Naskah menyatakan bahwa nilai I-HDI merupakan hasil agregasi dari kelima dimensi tersebut.

Tabel 1. *Data I-HDI Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2021–2025 (Data yang Tersedia dalam Naskah)*

No.	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
1	Kep. Selayar	65.555	66.520	68.247	68.939	72.396
2	Bulukumba	61.424	63.176	67.713	71.124	73.071
3	Bantaeng	65.491	67.571	68.253	69.616	75.027
4	Jeneponto	52.100	51.945	55.492	56.073	59.564
5	Takalar	56.149	55.015	58.165	58.801	67.125
6	Pare-pare	71.072	73.695	74.514	75.599	86.849
7	Palopo	67.579	67.373	81.507	81.905	85.901

Sumber: Hasil olah data peneliti (2026); tabel sumber belum memuat seluruh 24 kabupaten/kota.

Data yang tercantum memperlihatkan variasi nilai I-HDI antardaerah. Namun, tabel sumber hanya menampilkan sebagian baris dan mengganti baris lainnya dengan tanda elipsis. Karena itu, tabel ini belum dapat digunakan untuk menyajikan perbandingan lengkap seluruh 24 kabupaten/kota. Penulis perlu menyerahkan tabel data lengkap beserta sumber setiap indikator dan hasil perhitungannya.

Secara konseptual, variasi nilai antardaerah dapat mencerminkan perbedaan capaian pada dimensi pembentuk I-HDI. Akan tetapi, naskah belum menyajikan nilai masing-masing dimensi sehingga penyebab perbedaan nilai agregat belum dapat dianalisis secara empiris. Pembahasan pada tahap ini karena itu dibatasi pada pola angka yang dilaporkan penulis.

[8] Kadir, *Statistika Terapan: Konsep, Contoh dan Analisa Data dengan Program SPSS/Lisrel dalam Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

2. Perkembangan Rata-Rata I-HDI

Tabel 2. *Rata-Rata I-HDI Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2021–2025*

Tahun	Rata-rata I-HDI
2021	66.80
2022	67.09
2023	71.74
2024	73.02
2025	77.89

Sumber: Hasil olah data peneliti (2026).

Berdasarkan angka yang dilaporkan, rata-rata I-HDI meningkat dari 66,80 pada 2021 menjadi 67,09 pada 2022, 71,74 pada 2023, 73,02 pada 2024, dan 77,89 pada 2025. Dengan demikian, data agregat dalam naskah menunjukkan peningkatan setiap tahun. Kenaikan terbesar yang dilaporkan terjadi pada 2024–2025 sebesar 4,87 poin, sedangkan kenaikan terkecil terjadi pada 2021–2022 sebesar 0,29 poin.

Interpretasi atas tren tersebut masih perlu mempertimbangkan validitas agregasi. Nilai rata-rata tahunan harus dihitung ulang dari data lengkap 24 kabupaten/kota, karena tabel perhitungan yang disertakan belum memuat seluruh observasi. Penulis juga perlu menjelaskan apakah rata-rata dihitung secara aritmetis tanpa pembobotan atau menggunakan metode agregasi lain.

3. Peringkat Kabupaten/Kota Berdasarkan Rata-Rata I-HDI

Tabel 3. *Peringkat Kabupaten/Kota Berdasarkan Rata-Rata I-HDI Tahun 2021–2025*

Peringkat	Kabupaten/Kota	Rata-rata I-HDI
1	Makassar	91.15
2	Luwu Timur	81.75
3	Palopo	76.85
4	Enrekang	76.70
5	Pare-pare	76.35
6	Sidrap	75.96
7	Pinrang	74.60
8	Tana Toraja	74.45
9	Luwu	73.88
10	Soppeng	73.24
11	Toraja Utara	73.18
12	Luwu Utara	72.86
13	Gowa	70.92
14	Pangkep	69.44
15	Maros	69.42
16	Bantaeng	69.19
17	Kep. Selayar	68.33
18	Barru	67.31
19	Bulukumba	67.30
20	Wajo	66.94
21	Bone	65.04
22	Sinjai	62.44

Peringkat	Kabupaten/Kota	Rata-rata I-HDI
23	Takalar	59.05
24	Jeneponto	55.04

Sumber: Hasil olah data peneliti (2026).

Berdasarkan pemeringkatan yang disajikan, Kota Makassar menempati peringkat pertama dengan rata-rata I-HDI sebesar 91,15. Kabupaten Luwu Timur berada pada peringkat kedua dengan nilai 81,75, sedangkan Kota Palopo berada pada peringkat ketiga dengan nilai 76,85. Kabupaten Jeneponto menempati peringkat terakhir dengan nilai 55,04. Selisih antara nilai tertinggi dan terendah yang dilaporkan mencapai 36,11 poin.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa capaian I-HDI antardaerah belum merata menurut hasil perhitungan penulis. Meskipun demikian, pemeringkatan perlu diverifikasi kembali karena naskah belum menyajikan data lengkap pembentuk indeks dan rumus agregasinya. Selain itu, interpretasi tentang faktor penyebab kesenjangan belum dapat dilakukan hanya berdasarkan nilai indeks agregat.

Naskah menyatakan bahwa 15 kabupaten/kota (62,50%) mengalami peningkatan I-HDI secara konsisten, sedangkan 9 kabupaten/kota (37,50%) menunjukkan pola fluktuatif. Tidak ada daerah yang mengalami penurunan secara konsisten. Klaim ini perlu disertai tabel atau lampiran deret waktu lengkap agar pembaca dapat memeriksa klasifikasi pola perkembangan tersebut.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang dilaporkan, rata-rata I-HDI pada 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan meningkat dari 66,80 pada 2021 menjadi 77,89 pada 2025. Kota Makassar menempati peringkat tertinggi dengan nilai rata-rata 91,15, sedangkan Kabupaten Jeneponto berada pada peringkat terakhir dengan nilai 55,04. Hasil tersebut menunjukkan kecenderungan peningkatan agregat sekaligus perbedaan capaian antardaerah dalam pengukuran berbasis lima dimensi *Maqashid Syariah*.

Temuan ini memberi gambaran awal mengenai variasi pembangunan manusia berbasis I-HDI di Sulawesi Selatan. Namun, kesimpulan tersebut masih bersifat sementara sampai penulis melengkapi data seluruh kabupaten/kota, menampilkan formula perhitungan, menjelaskan bobot dan ambang kategori, serta mengonfirmasi periode data. Penelitian berikutnya dapat menguji keterkaitan tiap dimensi dengan kondisi sosial-ekonomi daerah setelah validitas indeks dipastikan.

Referensi

Ali Khan, M. N. A., Shafiai, S. R. M., & Rahman, A. A. (2021). Integrating Islamic Human Development Index with Islamic Wealth Index: A sustainable development approach. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(2), 264–282.

Amin, R. M., Abdullah Yusof, S., Haneef, M. A., Mohammed, M. O., & Oziev, G. (2015). The integrated development index (I-Dex): A new comprehensive approach to measuring human development. In H. A. El-Karanshawy et al. (Eds.), *Islamic economics: Theory, policy and social justice* (pp. 159–172). Bloomsbury Qatar Foundation.

Anto, M. B. H. (2011). Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to measure development in OIC countries. *Islamic Economic Studies*, 19(2), 69–95.

Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Indeks pembangunan manusia*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. (n.d.). Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan.

Baswir, R. (2009). *Manifesto ekonomi kerakyatan*. Pustaka Pelajar.

Bek, I. S., & Arsyianti, L. D. (2017). *Ekonomi pembangunan syariah* (Ed. ke-2). Rajawali Pers.

Bek, I. S. (2016). Islamisasi ilmu ekonomi. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 183–204. doi:10.32678/ije.v7i2.40.

Chamim Tohari. (2017). Pembaharuan konsep maqasid al-syari'ah dalam pemikiran Muhammad Thahir Ibnu Asyur. *Jurnal Al-Maslahah*, 13(1).

Eren, M., & Kaynak, S. (2017). An evaluation of EU member states according to human development and global competitiveness dimensions using the multi-period grey relational analysis (MP-GRA) technique. *Grey Systems: Theory and Application*, 7(1), 60–70. doi:10.1108/GS-08-2016-0023.

Emrie, S., & Suparmi, S. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi angka kematian bayi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia*, 5(1), 1–8. [DOI belum terverifikasi]

Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Analisis multivariat dan ekonometrika dengan EViews 10*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hapsari, & Herianingrum. (2014). Maqashid index, a success indicator of the social economic development. [Data bibliografi perlu dilengkapi]

Hasan, H., Ali, S. S., & Muhammad, M. (2018). Towards a maqashid al-shari'ah based development index. *Journal of Islamic Business and Management*, 8(1), 20–36. doi:10.26501/jibm/2018.0901-002.

Kadir. (2015). *Statistika terapan: Konsep, contoh dan analisa data dengan program SPSS/Lisrel dalam penelitian*. Rajawali Pers.

Khan, A. A. M. N., & Shafiai, S. R. M. (2019). Measuring the Islamic Human Development Index (I-HDI) for OIC countries. *Islamic Economic Studies*, 27(1), 87–114. [DOI belum terverifikasi]

Korten, D. C., & Sjahrir. (1988). *Pembangunan berdimensi kerakyatan*. Yayasan Obor Indonesia.

Chapra, M. U. (2000). *Islam dan tantangan ekonomi*. Gema Insani.

Maulina, Y. (2021). Analisis Islamic Human Development Index (I-HDI) di Kabupaten Bireuen [Tesis/skripsi, IAIN Malikussaleh].

Nasution. (2006). *Metode research (penelitian ilmiah)*. Bumi Aksara.

P3EI. (2012). *Ekonomi Islam* (Cet. ke-4). PT RajaGrafindo Persada.

Rafsanjani, H. (2018). *Islamic Human Development Index di Indonesia*. UMSurabaya Publishing.

Rukiah, R., Nuruddin, A., & Siregar, S. (2019). *Islamic Human Development Index di Indonesia* (suatu pendekatan Maqashid Syariah). *Istinbáth: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 18(2), 307–327. [DOI belum terverifikasi]. Artikel tersebut memang tercatat pada volume 18 nomor 2 tahun 2019.

Situmorang, S. H. (2017). *Analisis data*. USU Press.

Tono, S. (2005). Pemikiran dan kajian teori hukum Islam menurut Imam Al-Syatibi. *Al-Mawarid*, 13.

Nurlayli, S., & Jumarni, J. (2022). Pengaruh Islamic Human Development Index (I-HDI) dan penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011–2020. *AL-IQTISHAD: Jurnal Ekonomi*, 14(2), 114–130. doi:10.30863/aliqtishad.v14i2.3089.

Sugiyono. (2014). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan ekonomi* (Ed. ke-9, Jilid 1). Erlangga.

Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi penelitian bisnis dan ekonomi*. Pustaka Baru Press.

Darmawan, D. (2014). *Metode penelitian kuantitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Yektiningsih, E. (2018). Analisis *indeks pembangunan manusia* (IPM) Kabupaten Pacitan tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, 18(2), 32–50. doi:10.30742/jisa.v18i2.528.

Yurniwati, Y., Yonnedi, E., & Amin, Z. (2019). Measuring Islamic Human Development Index in West Sumatra, Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 27(1), 45–59. [DOI belum terverifikasi]

Yusuf, B., & Rama, A. (2019). Construction of Islamic Human Development Index. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 32(1), 43–64. doi:10.4197/Islec.32-1.3.